LAPORAN EVALUASI INTERNAL
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Pada hari ini Jumat, tanggal 17 April 2026, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos
   NRP : 70060445
   Jabatan : Deputi Bidang Penindakan

2. Nama : Irwan, S.Si., Apt., MKM.
   NIP : 19700615 199903 1 002
   Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penindakan

3. Nama : Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.
   NIP : 19810304 200312 1 001
   Jabatan : Ketua Tim SAKIP Deputi Penindakan

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi angaran dan capaian kinerja pada Deputi Bidang Penindakan periode 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 dengan hasil sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja dan Anggaran per Output

No	Rincian Output	Volume							Anggaran						
		Target	B1	%	B2	%	B3	%	Pagu (Ribu)	B1 (Ribu)	%	B2 (Ribu)	%	B3 (Ribu)	%
1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	4	0	0	0	0	1	25	310.464	0	0	26.752	8,62	54.983	17,71
2	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	15	0	0	1	6,66	1	6,66	2.117.118	0	0	265.526	12,54	451.871	21,34
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	2	0	0	0	0	0	0	888.171	0	0	25.614	2,88	74.153	8,35
4	Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	7	0	0	0	0	0	0	1.375.302	0	0	77.232	5,62	149.264	10,85
5	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	30	0	0	0	0	1	3,33	1.348.283	0	0	44.695	3,32	129.334	9,59
6	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	0	0	0	0	0	0	2.436.968	0	0	187.689	7,70	337.136	13,83
7	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang	17	0	0	0	0	0	0	1.164.487	0	0	177.651	15,26	229.289	19,69

No	Rincian Output	Volume							Anggaran						
		Target	B1	%	B2	%	B3	%	Pagu (Ribu)	B1 (Ribu)	%	B2 (Ribu)	%	B3 (Ribu)	%
	Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan														
8	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	14	0	0	0	0	1	7,14	3.879.415	119.691	3,09	529.270	13,64	974.813	25,13
9	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	2	0	0	0	0	0	0	374.890	0	0	2.641	0,70	8.634	2,30
TOTAL									**13.895.098**	**119.691**	**0,86**	**1.337.075**	**9,62**	**2.409.479**	**17,34**

B. Capaian Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran			Kendala/Hambatan
		Target	Realisasi TW I	Capaian %	Pagu (Ribu)	Realisasi TW I (Ribu)	Capaian %	
1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	4	1	25	310.464	54.983	17,71	Tidak ada kendala/hambatan
2	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	15	1	6,66	2.117.118	451.871	21,34	Tidak ada kendala/hambatan
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	2	0	0	888.171	74.153	8,35	Tidak ada kendala/hambatan
4	Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	7	0	0	1.375.302	149.264	10,85	Tidak ada kendala/hambatan
5	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	30	1	3,33	1.348.283	129.334	9,59	Tidak ada kendala/hambatan
6	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	0	0	2.436.968	337.136	13,83	Masih dalam proses pelaksanaan penanganan berkas carry over
7	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	17	0	0	1.164.487	229.289	19,69	Terdapat efisiensi sehingga masih dalam proses penentuan prioritas Spelaksanaan penindakan terhadap kasus

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran			Kendala/Hambatan
		Target	Realisasi TW I	Capaian %	Pagu (Ribu)	Realisasi TW I (Ribu)	Capaian %	
8	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	14	1	7,14	3.879.415	974.813	25,13	Tidak ada kendala/hambatan
9	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	2	0	0	374.890	8.634	2,30	Tidak ada kendala/hambatan

C. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran

1. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Januari

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B1	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	87,1	-	78	-	3.601.455	0	0
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	-	-	-	77,88	-	76	-	9.938.179	119.691	1,20
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	86,4	-	86,4	-	77.616	0	0
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	75	-	76,77	-	77.616	0	0
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi	-	-	-	3	-	5	-	77.616	0	0

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B1	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
		Bidang Penindakan										
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	2,91	-	3,05	-	77.616	0	0
TOTAL										**13.895.098**	**119.691**	**0,86**

*)

2. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Februari

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B11	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	87,1	-	78	-	3.601.455	365.341	10,14

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B11	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	-	-	-	77,88	-	76	-	9.938.179	944.980	9,47
3	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	86,4	-	86,4	-	77.616	6.535.112	8,42
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	75	-	76,77	-	77.616	19.844.954	9,21
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	3	-	5	-	77.616	19.232.961	8,42
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	2,91	-	3,05	-	77.616	6.535.111	8,42
TOTAL										**13.895.098**	**1.337.075**	**9,62**

3. Capaian Rencana Aksi Perjanjian dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Maret

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B3	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	19,58	30	65,27	87,1	22,47	78	25,09	3.601.455	566.426	15,73
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	48,25	44,3	108,92	77,88	61,95	76	63,48	9.983.179	1.778.070	17,91
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	86,4	-	86,4	-	77.616	18.717	24,12
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	75	-	76,77	-	77.616	13.569	17,48
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	3	-	5	-	77.616	11.348	14,62

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B3	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	2,91	-	3,05	-	77.616	11.348	14,62
TOTAL										**13.895.098**	**2.409.479**	**17,34**

D. Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Matriks Rekomendasi Triwulan I

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Target indikator keberhasilan tidak tercapai karena terdapat pemotongan anggaran yang menyebabkan penyesuaian (target awal 197 perkara menjadi perkara 115). Namun demikian usulan penyesuaian tersebut belum dapat disahkan, menunggu persetujuan dari DJA sehingga	Melakukan revisi terhadap target perkara sesuai dengan pemotongan anggaran.	Melakukan monitoring terhadap usulan penyesuaian target DJA.	TW II 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dalam perhitungan masih menggunakan target lama.						
2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Tidak ada kendala	-	-	-	-	-	-
3	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	-	-	-	-
4	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	-	-	-	-
5	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
6	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

(1) Diisi dengan nomor urut indikator

(2) Diisi dengan nama indikator

(3) Diisi dengan kendala/permasalahan dari tiap indikator

(4) Diisi dengan rekomendasi berdasarkan arahan pimpinan untuk tiap kendala dari masing-masing indikator

(5) Diisi dengan tindak lanjut atas rekomendasi. Rencana tindak lanjut dimungkinkan sama dengan rekomendasi atau merupakan tahapan pelaksanaan rekomendasi secara lebih rinci.

(6) Diisi dengan waktu penyelesaian tindak lanjut/rekomendasi

(7) Diisi Ya jika indikator/kendala/rekomendasi/rencana tindak lanjut telah dikelola sebagai risiko (terdapat dalam daftar risiko) Diisi Tidak jika indikator/kendala/rekomendasi/rencana tindak lanjut tidak/belum dikelola sebagai risiko (terdapat dalam daftar risiko).

(8) Diisi (jika pada Kolom 7 dengan jawaban Ya) dengan kode risiko yang relevan dengan Rencana Tindak Lanjut (kolom 5) dan terdaftar dalam aplikasi SAPA APIP.

(9) Diisi (jika pada Kolom 7 dengan jawaban Ya) dengan peristiwa risiko sesuai Kode Risiko pada kolom 8.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 April 2026

Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan,

Dewa Gede Bayu Kastika, S,Si., Apt., M.E

NIP. 198103042003121001

Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penindakan,

Irwan, S.Si., Apt., MKM.

NIP. 197006151999031002

Deputi Bidang Penindakan,

Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K, M.Sos.

NRP. 70060445

Lampiran a. Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Triwulan I Tahun 2026

I. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

- Definisi Operasional :
  a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
     1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
     2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
     3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
     4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
  c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
     (Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah Perkara P21 x 0.85 + Jumlah Perkara Tahap II x 1) / Jumlah Target Perkara x 100%)
  d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani siterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
  e. Perkara *carryover* yang terhitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara *carryover* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
  f. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

- Cara Perhitungan

  Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

  (Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah Perkara P21 x 0.85 + Jumlah Perkara Tahap II)

- Perhitungan Realisasi:

Tahapan	Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over			
SPDP	197	63	11	9	0.15	3	**19,58**
Tahap I			4	13	0.55	9,35	
P21			1	22	0.85	19,55	
Tahap II			0	19	1	19	
Total	17	63	16	63			

II. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

- Definisi Operasional :

  Kegiatan Deteksi mencakup pelaksanaan dari kegiatan Siber, Cegah Tangkal dan Intelijen yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi antara lain:

  1. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang berisi informasi seluruh hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindak lanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber sediaan farmasi dan makanan, dan analisis digital forensik sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yang dimanfaatkan adalah rekomendasi yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.

2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan makanan, berupa: penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan.
3. Rekomendasi Intelijen adalah rekomendasi dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindak lanjut yang disarankan. Rekomendasi intelijen yang berkualitas dihitung melalui survey kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.

- Cara Perhitungan :
  a. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan
  b. Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti
  c. Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti

  Rumus : $\frac{a+b+c}{3} x100\%$

- Perhitungan Realisasi:

Indikator	Jan	Feb	Mar
Persentase Rekomendasi Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan			85,04
Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	-	-	-
Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti			50
Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal			**48,25**

III. Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan

- Definisi Operasional :

  a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

  b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean governance* menuju BPOM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

  c. Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

     1) Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
     2) Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

- Cara Perhitungan :

  Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assesment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

  Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen, yaitu:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8 %
2	Penataan Tatalaksana	7 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10 %
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
5	Penguatan Pengawasan	15 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang Prima	17,5 %

- Perhitungan Akhir Tahun

  Target ditetapkan di akhir tahun

IV. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Penindakan

- Definisi Operasional

  a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

  b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

  c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

  d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

- Cara Perhitungan

  Penjumlahan 4 (empa) komponen penilaian AKIP, yaitu:

  1) Perencanaan Kinerja;
  2) Pengukuran Kinerja;
  3) Pelaporan Kinerja;
  4) Evaluasi Kinerja Internal;

  Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	25
Nilai Evaluasi		**100**

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak
7	D	>0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

- Perhitungan Akhir Tahun

  Target ditetapkan di akhir tahun

V. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

- Definisi Operasional
  a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
  b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
  c. 8 (delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
     1) Revisi DIPA (bobot 10%)
     2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
     3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
     4) Belanja Kontraktual (bobot 10%)
     5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
     6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
     7) Capaian Output (bobot 25%)
     8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
   1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
   2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

- Cara Perhitungan:

  Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

  Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

- Perhitungan Akhir Tahun:

  Target ditetapkan di akhir tahun

VI. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

- Definisi Operasional:
  a. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
  b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
  c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) katageri. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
   1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
   2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
   3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

- Cara Perhitungan:

  Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = $\frac{Skor\ Total}{16}$

Keterangan:

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama.

- Perhitungan Akhir Tahun:

  Target ditetapkan di akhir tahun

Lampiran b.

NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TW I

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 13 April 2026
Waktu : 09.30 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Batik Lantai 4
Pimpinan Rapat : Ketua Tim Sakip Deputi Bidang Penindakan
Peserta Rapat : Tim Sakip Deputi Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Memantau pencapaian kinerja dan realisasi anggaran
2. Mengidentifikasi kendala dan hambatan serta menentukan rekomendasi dan rencana tindak lanjut atas kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja.
3. Pembahasan terkait laporan evaluasi internal TW I
4. Pembahasan terkait tindak lanjut rekomendasi atas capaian program/kegiatan dan status tindak lanjut rekomendasi Triwulan I Tahun 2026
5. Pembahasan terkait penyusunan laporan kinerja interim TW I

III. Arahan dan Petunjuk

A. Arahan Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan

1. Sehubungan telah berakhirnya periode triwulan I, mengingatkan batas waktu pelaporan monitoring dan evaluasi yaitu tanggal 20 April 2026 untuk Berita Acara Laporan Evaluasi Internal TW I dan 27 April 2026 Untuk Laporan Kinerja Interim TW I.
2. Oleh karena itu, diharapkan seluruh unit kerja, khususnya para anggota tim SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Penindakan, dapat melakukan koordinasi internal, mengumpulkan data pendukung kinerja, dan menyusun laporan sesuai format yang telah ditetapkan.
3. Sehubungan dengan adanya pedoman SAKIP terbaru yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025. Mohon agar laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim agar disesuaikan dengan pedoman tersebut.
4. Sebelum laporan evaluasi internal ditetapkan agar diagendakan pembahasan dengan Bapak Deputi dan para Direktur terlebih dahulu untuk meminta arahan dan masukan untuk perbaikan kedepan. Mohon untuk dipersiapkan PPT paparan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran TW I.

5. Sehubungan dengan hasil rapat pembahasan LHE SAKIP bersama Biro Perencanaan dan Keuangan, diperlukan pembahasan lanjutan dengan Inspektorat. Untuk itu, dimohon agar dipersiapkan bahan serta undangan guna pelaksanaan pertemuan dengan Inspektorat terkait pembahasan LHE SAKIP Deputi Bidang Penindakan. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas SAKIP, tetapi juga mencakup penyampaian isu-isu akuntabilitas yang terdapat di unit kerja.
6. Terkait tindak lanjut rekomendasi atas capaian program/kegiatan dan status tindak lanjut rekomendasi Triwulan I Tahun 2026, agar ditungkan dalam tabel matriks pada lampiran.
7. Terakhir, meminta perhatian dan komitmen dari rekan sekalian agar penyampaian laporan dilakukan tepat waktu, tepat isi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bila diperlukan, mengadakan rapat lanjutan untuk finalisasi laporan monitoring dan evaluasi.

Notulis: Ni Ketut Ayu Dewitasari

LAMPIRAN MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2026

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan		4	1	25	Tidak ada kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW II 2026	Telah dilakukan monitoring informasi mengenai kebijakan efisien anggaran, telah tersusun 4 laporan koordinasi pengawasan obat dan makanan	Selesai TW IV 2025		

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan		15	1	6,66	Tidak ada kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW II 2026	Telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor lain dehingga data dan informasi	Selesai TW IV 2025		

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dibutuhkan telah terpenuhi untuk penyusunan rekomendasi			
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan		2	0	0	Tidak ada kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW II 2026	Telah dilakukan monitoring dan diketahui pada akhir tahun anggaran RO ini tetap	Selesai TW IV 2025		

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terblokir 100%			
4	Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan		7	0	0	Tidak ada kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW II 2026	Telah dilakukan monitoring informasi mengenai kebijakan anggaran dan terdapat pembukaan	Selesai TW IV 2025		

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									blokir sebagian dengan volume 1 dokumen			
5	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas		30	1	3,33	Tidak ada kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW II 2026	Telah dilaksanakan kegiatan/ operasi intelijen dengan mempertimbangkan lingkup	Selesai TW IV 2025		

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									wilayah operasi			
6	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I		5	0	0	Tidak ada kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW II 2026	Penyelesaian berkas perkara sampai dengan tahap II	Selesai TW IV 2025		

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan		17	0	0	Tidak ada kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW II 2026	Telah dilakukan 13 operasi penindakan sebagai bentuk optimalisasi penyidikan dengan adanya penyesuaian kebijakan efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan	Selesai TW IV 2025		

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									cakupan wilayah operasi			
8	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan		14	1	7,14	Tidak ada kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW II 2026	Telah dihasilkan 9 rekomendasi analisis siber sebagai bentuk layanan yang diberikan Direktorat	Selesai TW IV 2025		

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Siber kepada stakeholder terkait			
9	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber		2	0	0	Tidak ada kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW II 2026	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin telah dilakukan 100% dalam mendukung	Selesai TW IV 2025		

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tercapainya output dokumen hasil monitoring dan evaluasi rekomendasi tindak lanjut patroli siber			

Keterangan:

(1) Diisi dengan nomor urut KRO/RO

(2) Diisi dengan nama KRO/RO

(3) Diisi mulai Triwulan II/III/IV, isi narasi terkait capaian output pada Triwulan I/II/III

tercapai atau tidak

(4) Diisi dengan target KRO/RO

(5) Diisi dengan Realisasi KRO/RO

(6) Diisi dengan Capaian KRO/RO

(7) Diisi dengan Kendala/hambatan atas capaian KRO/RO pada Triwulan On going

(8) Diisi dengan Rencana tindak lanjut atas kendala/hambatan pada Triwulan On going

(9) Diisi dengan Batas waktu pemenuhan rencana tindak lanjut atas kendala/hambatan pada Triwulan On going

(10) Diisi dengan rencana tindak lanjut atas kendala/hambatan pada periode sebelumnya

(11) Diisi dengan Simpulan rencana tindak lanjut triwulan sebelumnya sudah selesai atau belum selesai

(12) Diisi Jika belum selesai diisi batas waktu penyelesaian rencana tindak lanjut periode sebelumnya

(13) Diisi upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian realisasi On Going

LAMPIRAN MATRIKS STATUS TINDAK LANJUT REKOMENDASI

TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan								-	-
2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal									

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan									
4	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	Terdapat kelemahan pada perencanan kinerja, pengkukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal	Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP	Tim SAKIP melakukan reviu secara berkala terhadap perencanaan kinerja, pengkuran kinerja, pelaporan inerja, dan evaluasi akuntabilitas internal	On progress	Telah dilakukan reviu terhadap perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas interna	2026	T	SDM.3.02.	Terdapat kelemahan pada perencanan kinerja, pengkukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal
		Capaian indikator	Melakukan reviu target dan	Menetapkan target kinerja		Target telah ditetapkan			O.3.01	Capaian indikator

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya	mengawal realisasi secara berkala	berdasarkan capaian tahun 2025 serta memonitoring capaian		berdasarkan capaian tahun 2025				kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya
5	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun berjalan sehingga realisasi perencanaan tidak sesuai dengan target awal yang telah ditentukan serta tidak memungkink	Unit kerja di lingkungan bidang penindakan berupaya untuk melakukan reviu target guna mencapai target yang ditetapkan dengan optimal	Melakukan reviu target guna memastikan target yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal	Telah dilakukan reviu target sesuai dengan realisasi tahun 2025 yaitu 3	Selesai	TW IV 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		an bagi masing-masing unit kerja untuk melakukan revisi atau penyesuaian target								
6	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	Belum optimalnya implementasi manajemen risiko yang ditandai adanya sejumlah catatan atas implementasi manajemen risiko yang ada pada	Melakukan perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan dalam laporan hasil penilaian manajemen risiko tahun 2025	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan dalam laporan hasil penilaiaan manajemen risiko	On progress	Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi	TW IV 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		laporan hasil penilaiaan manajemen risiko tahun 2025								

Keterangan:

(1) Diisi dengan nomor urut indikator

(2) Diisi dengan nama indikator

(3) Diambil dari laporan triwulan sebelumnya

(4) Diambil dari laporan triwulan sebelumnya

(5) Diambil dari laporan triwulan sebelumnya.

(6) Diisi dengan status rencana tindak lanjut. Jika sudah selesai diisi selesai, jika belum selesai lanjut mengisi progres tindak lanjut tersebut

(7) Diisi dengan progres tindak lanjut dari rekomendasi

(8) Diisi dengan timeline penyelesaian progres tindak lanjut

(9) Diisi sesuai kondisi pada laporan triwulan sebelumnya atau dengan kondisi terbaru yang telah dilakukan penyesuaian.

(10) Diisi (jika pada Kolom 9 dengan jawaban Ya) dengan kode risiko yang relevandengan Rencana Tindak Lanjut (kolom 5) dan terdaftar dalam aplikasi SAPA APIP.

(11) Diisi (jika pada Kolom 9 dengan jawaban Ya) dengan peristiwa risiko sesuai Kode Risiko pada kolom 10.

IV. Dokumentasi

V. Undangan dan Daftar Hadir

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telepon (021) 42878164, Ekstensi 1127
Email : penyidikan_om@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Nomor	:	PR.10.01.64.04.26.66
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Deputi Bidang Penindakan Triwulan 1 Tahun 2026

Jakarta, 10 April 2026

Yth.
Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan
di Lingkungan Badan POM

Dalam rangka penyusunan Laporan Evaluasi Internal Deputi Bidang Penindakan Trwiulan 1 Tahun 2026, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan akan mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan masukan dari unit terkait. Sehubungan dengan itu, kami mengungudang Bapak /Ibu untuk hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	: Senin, 13 April 2026
Waktu	: 09.00 – 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Gedung Batik Lt. 4

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Penyidikan Obat dan Makanan,

Brigjen Pol. Partomo Iriananto, S.I.K., M.H.

DAFTAR HADIR

RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI INTERNAL TW 1 TAHUN 2025

JAKARTA, 13 APRIL 2026

No.	Nama	NIP/NRP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Unit Kerja	Jenis Kelamin	Tanda Tangan
1.	[illegible]	1991[illegible]	IVc	KFM	CT	L	
2.	Imam Aziz Galang W	100305222019031004	III b	perencana	CT	L	
3.	Arif Susanto	199912162008211015	IV	PLO	Biro Umum	L	
4.	Warmanto Firmansyah	198503312008121001	III d	Staf Ahli	Biro Umum	L	
5.	Syukron Akbar	199308142019031001	III b	perencana	Dit. Siber	L	
6.	Lina Nurul I	199304172023212038	IX	Perencana	Dit. Penyidikan	P	
7.	Rewhalinda Dwi	199910022023212023	- / IX	Perencana	Dit. Penyidikan OM	P	
8.	Mohawon Primbar. P	199802232023211019	- / IX	PLO	Dit. Penyidikan OM	L	
9.	Izmi Ulfi Soumena	199602232023062007	Penata Muda / III/a	Perencana	Dit. IOM	P	
10.	Ni Ketut Ayu Dewitasari	200204182023042003	Penata Muda / III/a	Perencana	Dit. CT	P	

No.	Nama	NIP/NRP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Unit Kerja	Jenis Kelamin	Tanda Tangan
11	Aliita Varanski Amadea	199208022023212017	IX	PLO	Dit. siber OM	P	

Penanggung Jawab Kegiatan,

Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si, Apt.,M.E
NIP 198103042003121001

NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TW I DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2026

Waktu : 13.000 - selesai

Tempat : Ruang Rapat Deputi Bidang Penindakan

Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Penindakan

Peserta Rapat : 1. Eselon 2 di lingkungan Kedeputian IV

2. Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Capaian Anggaran dan Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan
2. Output, Kendala, Rencana Tindak Lanjut per Direktorat

III. Arahan dan Hasil Rapat

1. Arahan Deputi Bidang Penindakan

- Deputi Bidang penindakan menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan instrument utama dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan anggaran, terutama dalam kondisi efisiensi fiskal yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Disampaikan bahwa:
    - Terjadi penyesuaian signifikan terhadap target output dan pagu anggaran sehingga diperlukan pengendalian yang lebih ketat.
    - Monev TW I menjadi momentum untuk :
        - Mengukur realisasi awal kinerja
        - Mengindentifikasi deviasi terhadap target
        - Menyusun Langkah korektif sejak dini
- Deputi meminta seluruh direktur untuk menyampaikan secara komprehensif:
    - Realisasi capaian kinerja dan anggaran s.d 31 Maret 2026
    - Permasalahan teknis dan administrative
    - Rencana tindak lanjut yang terukur dan implementatif
- Evaluasi tahun 2025:
    - Dari 6 indikator kinerja, terdapat 3 indikator belum mencapai target yang perlu menjadi perhatian serius
    - Indikator "*Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan"* mencapai **117,7%,** sehingga target 2026 perlu disesuaikan (tidak terlalu rendah namun tetap realistis)
- Terkait SAKIP:
    - Terjadi penurunan nilai dari **75,85 (2024) menjadi 74,92 (2025)**
    - Deputi menekankan percepatan tindak lanjut LHE Inspektorat, dan perlunya rapat khusus dengan Inspektorat dan Biro Perencanaan Keuangan
- Penekanan tambahan:
    - Peningkatan kompetensi SDM SAKIP dan keuangan
    - Penyampaian Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim TW I tepat waktu dan sesuai pedoman

2. **Penyaajian Kinerja Direktorat Cegah Tangkal:**
   - **Capaian Kinerja**
     - Penyusunan peta kerawanan kejahatan obat dan makanan sebanyak 2.501 data kerawanan.
     - Pelaksanaan kegiatan strategis:
       - Deklarasi Komitmen Bersama Pencegahan Obat dan Makanan Palsu (5 Februari 2026)
       - Dilaksanakan secara *hybrid* dan melibatkan:
         - K/L terkait
         - Asosiasi pelaku usaha (GAPMMI, MIAP)
         - Akademisi, organisasi profesi, dan media
   - ***Outcome*:**
       - Terbangunnya komitmen lintas sektor dalam pencegahan kejahatan obat dan makanan
   - **Permasalahan/Kendala**
       - Pedoman Cegah Tangkal terbaru belum tersosialisasi secara merata ke seluruh UPT
       - Integrasi data UPT-UPT baru ke Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) belum optimal
       - Efisiensi anggaran menyebabkan:
         - Penundaan kegiatan
         - Pengurangan intensitas kegiatan lapangan
   - **Rencana Tindak Lanjut**
       - Melaksanakan Sosialisasi pedoman secara nasional, Supervisi langsung ke UPT dan Forum koordinasi rutin
       - Penguatan sistem Koordinasi dengan PUSDATIN untuk integrasi ADP
   - **Strategi**:
       - Reprioritisasi kegiatan berbasis risiko kerawanan

3. **Penyajian Data Kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan**
   - **Capaian Kinerja**
     61.564 tautan/link direkomendasikan untuk takedown (Jan–Mar 2026), dengan rincian:
       - Obat: 13.466
       - Kosmetik: 19.300
       - Pangan olahan: 13.877
       - Obat bahan alam: 10.548
       - Suplemen: 2.450
       - Obat kuasi: 1.923
   - **Penjejakan digital:**
       - 21 rekomendasi profiling siber:
         - 19 → ditindaklanjuti intelijen
         - 1 → penindakan
         - 1 → pemeriksaan setempat
   - **Digital forensik:**
       - Pemeriksaan terhadap **3 barang bukti elektronik (HP)**
       - Dukungan forensik ke Balai POM Mamuju, dan Balai POM Jember
   - **Permasalahan/Kendala**
       - Pedoman operasi siber dan SOP:
         - Belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kejahatan digital
       - Efisiensi anggaran:
         - Membatasi operasi patroli dan pengembangan teknologi
   - **Rencana Tindak Lanjut**

        - Penyusunan dan harmonisasi:
            - Pedoman operasi siber
            - SOP lintas unit
- **Penyesuaian**:
    - Target output
    - Skala prioritas kegiatan
- **Penguatan**:
    - Kolaborasi internal Kedeputian

4. **Penyajian Data Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan**
    - **Capaian Kinerja**
      Pelaksanaan operasi intelijen menghasilkan:
      - **3 laporan intelijen**
      - **2 rekomendasi intelijen**

      Fokus kegiatan:
      - Pengumpulan informasi strategis
      - Analisis potensi kejahatan
    - **Permasalahan/Kendala**
      - Lead time operasional meningkat waktu dari rekomendasi → penindakan menjadi lebih lama
    - **Keterbatasan:**
      - Anggaran
      - Fleksibilitas administrasi keuangan
    - **Rencana Tindak Lanjut**
      - Percepatan proses joint review strategis lintas unit
      - Inovasi: Pengembangan Mobile Lab (rapid test) untuk mempercepat pembuktian
      - manajemen:
        - Penyusunan prioritas rekomendasi
        - Protokol pelaporan khusus

5. **Penyajian Data Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan**
    - **Capaian Kinerja**
      - Kegiatan utama:
        - Pendalaman informasi kasus
        - Pendampingan penyidikan UPT
    - **Nilai keekonomian barang bukti: Rp 539.976.575**
      - Pendampingan dilakukan secara:
        - Daring (dominan)
        - Luring (terbatas)
    - **Permasalahan/Kendala**
      - Perbedaan persepsi penerapan KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025) antar APH
      - Efisiensi anggaran:
        - Menghambat operasi lapangan
      - Keterbatasan:
        - Intensitas pendampingan langsung
    - **Rencana Tindak Lanjut**
      - Koordinasi intensif:
        - Korwas
        - Kejaksaan Agung RI
      - Strategi:
        - Pendampingan berbasis prioritas kasus (pembobotan)

6. **Arahan Deputi terhadap target yang belum tercapai**

- **Deputi menegaskan:**
    - Target yang belum tercapai harus dianalisis hingga akar masalah
- **Arahan utama:**
    - Penyesuaian target 2026 secara rasional dan berbasis data historis
    - Optimalisasi sumber daya yang terbatas
    - Percepatan realisasi output sejak awal tahun
- **Penekanan:**
    - Tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas output
    - Setiap direktorat wajib memiliki rencana aksi percepatan (*action plan*)
- **Deputi juga menekankan:**
    - Pentingnya sinergi antar direktorat (cegah tangkal – siber – intelijen – penyidikan)
    - Penguatan pendekatan end to end penindakan

7. **Diskusi (Para Direktur di Kedeputian Bidang Penindakan)**
    - **Isu Strategis yang Dibahas**
        - Efisiensi anggaran berdampak langsung pada Penurunan volume kegiatan Pergeseran metode pelaksanaan (offline → online)
        - Kebutuhan:
            - Harmonisasi SOP antar direktorat
            - Integrasi data dan sistem informasi
        - **Permasalahan operasional:**
            - Lambatnya tindak lanjut hasil intelijen
            - Keterbatasan dukungan teknologi
    - **Masukan dan Pendapat Direktur**
        - **Perlu:**
            - Penguatan koordinasi lintas direktorat berbasis kasus
            - Dashboard terpadu untuk monitoring penindakan
            - Standarisasi alur kerja dari intelijen hingga penyidikan
        - **Usulan:**
            - Penetapan prioritas berbasis risiko (*risk-based approach*)
            - Penguatan kapasitas digital forensik
            - Peningkatan dukungan regulasi teknis
    - **Kesepakatan**
        - **Dilakukan:**
            - Reprioritisasi kegiatan TW II
            - Peningkatan kolaborasi lintas direktorat
            - Percepatan tindak lanjut rekomendasi
        - **Setiap direktorat:**
            - Menyusun rencana aksi percepatan kinerja TW II
            - Melaporkan progres secara berkala

Notulis: Arif Suseno

IV. Dokumentasi

V. Undangan dan Daftar Hadir

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : PR.08.02.6.04.26.32 Jakarta, 14 April 2026
Perihal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

Yth.
1. Direktur Cegah Tangkal
2. Direktur Intelijen Obat dan Makanan
3. Direktur Siber Obat dan Makanan
4. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
5. Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan

Di Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan Triwulan I Tahun 2026, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 April 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Deputi Bidang Penindakan Gedung Garuda Lantai 1
Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Penindakan,

Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K, M.Sos.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2026.
Agenda : Rapat Monev Program/Kegiatan Tw I Tahun 2026
Tempat : Ruang Rapat Deputi Bidang Penindakan.

No	Nama	Jabatan/Unit	Tanda Tangan
1	Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K, M.Sos	Deputi Bidang Penindakan	
2	Brigjen Pol. Partomo Irananto, S.I.K., M.H.	Direktur Penyidikan	
3	Irwan, S.Si, Apt, MKM	Direktur Cegah Tangkal	
4	Rizkal, S.Sos., M.M	Direktur Intelijen	
5	Nur Iskandarsyah, S.IP, M.T, M.Sc	Direktur Siber	
6			
7	Wirmanto Fimansyah	Sekre Deputi 4	
8	Linda Octaviani	Dit. Penyidikan	
9	Indriyana	Dit. CT	
10	Imam Aris Galang W	dit. CT	
11	Ni Ketut Ayu Dewitasari	Perencana / Dit. CT	
12	Izmi Ulfi Soumena	Perencana / Dit. IOM	
13	Lina Nurul Ikhsani	Perencana / Dit Penindakan	
14	Ruhalinda Dewi	Perencana / Dit Penyidikan OM	
15	Mahawan Pimbor P	PLO / Dit. Penyidikan OM	
16	Arif Suseno	PLO / Biro umum	
17	Fajar Bayu R	Perencana / Dit. Siber	
18	Rani Pamungkas	Biro Umum	
19	Iman Budipertama. S	Biro Umum	
20	Intan	Biro Umum	
21	A. Yuni Nurfiani	Pramuka SDMA/SIGAP	
22	Nadiva Farani Ssy. A.	PLO	
23	Septiansah	BPOM Sekre Dep. 4	
24			
25			

BADAN POM

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Jakarta, 16 April 2026

1

OUTLINE

1 CAPAIAN ANGGARAN DAN SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

2 OUTPUT, KENDALA, RENCANA TINDAK LANJUT PER DIREKTORAT

2

BADAN POM

1 CAPAIAN ANGGARAN DAN SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

3

PAGU ANGGARAN TAHUN 2026

Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Prioritisasi Anggaran		Pagu Anggaran Tersedia
			Jumlah (Rp)	%	
DR.063	Deputi Bidang Penindakan	22.742.424.000	8.847.326.000	38,9	13.895.098.000
4117	Direktorat Cegah Tangkal	5.952.163.000	2.636.410.000	44,3	3.315.753.000
4118	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	4.729.902.000	2.006.317.000	42,4	2.723.585.000
4134	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	6.214.667.000	2.613.212.000	42,1	3.601.455.000
6386	Direktorat Siber Obat dan Makanan	5.845.692.000	1.591.387.000	27,2	4.254.305.000

4

PENAJAMAN ANGGARAN TAHUN 2026

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (setelah prioritisasi)	Penajaman Anggaran		Pagu Anggaran Tersedia (saat ini)*
			Jumlah (Rp)	%	
DR.063	Deputi Bidang Penindakan	13.895.098.000	29.590.000	0,21	13.865.508.000
4117	Direktorat Cegah Tangkal	3.315.753.000	6.445.000	0,19	3.309.308.000
4118	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	2.723.585.000	2.244.000	0,08	2.721.341.000
4134	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	3.601.455.000	19.581.000	0,54	3.581.874.000
6386	Direktorat Siber Obat dan Makanan	4.254.305.000	1.320.000	0,03	4.252.985.000

*Revisi DIPA sedang berproses di DJA

CAPAIAN ANGGARAN TW I TAHUN 2026

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	% Target	% Capaian
1	Direktorat Cegah Tangkal	3,122,289,000	561,240,320	17,98	15	119,87
2	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	2.801.687.000	288,775,200	10,31	15	68,73
3	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	3.646.455.000	571,789,491	15,68	15	104,53
4	Direktorat Siber Obat dan Makanan	4.324.667.000	987,674,824	22,84	15	152,27
Deputi Bidang Penindakan		**13.895.098.000**	**2,409,479,835**	**17,34**	**15**	**115,60**

s.d 31 Maret 2026

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TW 1 TAHUN 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Volume					Kendala	RTL
			Realisasi	Target B3	%	Target Tahunan	%		
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	19,58	30	65,27	87.1	22,47	Target indikator keberhasilan tidak tercapai karena terdapat pemotongan anggaran yang menyebabkan penyesuaian target perkara (Target perkara awal 197, disesuaikan menjadi 115). Namun demikian usulan penyesuaian tersebut belum dapat disahkan, menunggu persetujuan dari DJA sehingga dalam perhitungan masih menggunakan target lama.	Melakukan monitoring terhadap usulan penyesuaian target DJA.
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	48.25	44.3	108.92	77.88	61.95	Tidak ada kendala	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TW 1 TAHUN 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Volume					Keterangan
			Realisasi	Target B3	%	Target	%	
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	86.4	-	Hasil Reviu LKE ZI Inspektorat Tahun 2025 1. Cegah Tangkal: **TMS**, belum melampirkan surat pengajuan TPU 2. Intelijen: **MS** 3. Penyidikan: **TMS**, belum melaporkan WBS 4. Siber: **TMS**, belum melampirkan surat pengajuan TPU Target di tetapkan di akhir tahun. Realisasi Tahun 2025: 86,14
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	75	-	Target di tetapkan di akhir tahun. Realisasi Tahun 2025: 74,92 Realisasi Tahun 2024: 75,86
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	3	-	Target di tetapkan di akhir tahun. Realisasi Tahun 2025: 3
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	2.91	-	Target di tetapkan di akhir tahun. Realiasi Tahun 2025: 2,906

BADAN POM

2 OUTPUT, KENDALA, RENCANA TINDAK LANJUT PER DIREKTORAT

BADAN POM

Direktorat Cegah Tangkal

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TRIWULAN 1 TAHUN 2026

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran			Kendala / Hambatan
		Target	Realisasi s.d. 31 Maret	%	Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi s.d. 31 Maret (Ribu)	%	
1	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	4	1	25%	310.464	54.983	17.71%	Tidak ada kendala/hambatan
2	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	15	1	6,66	2.117.118	451.871	21.34%	Tidak ada kendala/hambatan
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	2	0	0	888.171	74.15	8.35%	Tidak ada kendala/hambatan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TW I TAHUN 2026
DIREKTORAT CEGAH TANGKAL

No	Sasaran Program	Indikator	Volume				
			Realisasi	Target TW 1	%	Target Tahunan	%
1	Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti	-	-	-	64	-
2	Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid	Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Tervalidasi	99.64	91	109.49	97	102.72
3	Terwujudnya tata kelola unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	-	-	-	90	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal sesuai standar	36	36	100	100	36
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal	80	75	106.67	100	80
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	-	-	-	2.85	-

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT CEGAH TANGKAL S.D 31 Maret 2026

Penggalangan Stakehoders

Deklarasi Komitmen Bersama dan Pencanangan Program Perkuatan Penanganan Obat dan Makanan Palsu

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026, dilaksanakan secara hybrid dengan peserta dari kementerian/lembaga, asosiasi pelaku usaha, organisasi profesi, akademisi dan media serta internal BPOM di seluruh Indonesia. Seperti perwakilan asosiasi pelaku usaha yaitu GAPMMI, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kementerian/lembaga, asosiasi pelaku usaha, dan pemangku kepentingan yang terlibat menyatakan komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan peredaran Obat dan Makanan palsu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Peta Kerawanan

2501 Data Kerawanan Kejahatan

Obat	948
Kuasi	43
Obat Bahan Alam	428
Suplemen Kesehatan	50
Kosmetik	768
Pangan Olahan	260

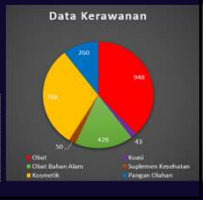

Kendala dan Upaya Perbaikan Fungsi Cegah Tangkal

Kendala

- Pedoman pelaksanaan Cegah Tangkal terbaru belum tersosialisasi secara optimal kepada UPT
- Data UPT-UPT baru belum terintegrasi pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP)
- Adanya kebijakan pemotongan anggaran yang mengakibatkan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana

RTL

- Melaksanakan sosialisasi pedoman baru kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang disertai dengan kegiatan supervisi, serta menyelenggarakan pertemuan rutin sebagai sarana koordinasi, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan koordinasi dengan PUSDATIN terkait pengembangan ADP
- Melakukan penyesuaian prioritas dan strategi pelaksanaan agar tetap mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

BADAN POM

Direktorat Siber Obat dan Makanan

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TRIWULAN 1 TAHUN 2026

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran			Kendala / Hambatan
		Target	Realisasi s.d. 31 Maret	%	Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi s.d. 31 Maret (Ribu)	%	
1	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	14	1	7,14	3.879.415	974.813	25.13%	Tidak ada kendala/hambatan
2	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	2	0	0	374.890	8.634	2.30%	Tidak ada kendala/hambatan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN
Periode Januari – Maret (TW 1) Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Volume				
			Realisasi	Target TW I	%	Target Tahunan	%
1.	Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	94,74	80,11	118,26	89,11	106,32
2.	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif	Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	79,76	79,5	100,33	83,9	94,76
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Siber Obat dan Makanan	0	0	0	83,6	0
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan sesuai standar	36	36	100	100	36
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	75	88	85,23	100	75
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	0	0	0	2,94	0

HASIL PATROLI SIBER TAHUN 2026
BERDASARKAN KOMODITAS
Periode Januari – Maret 2026

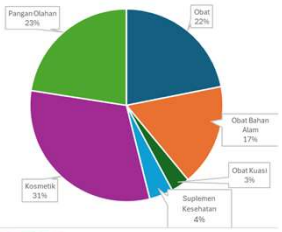

Jumlah link yang direkomendasikan takedown periode Januari s.d. Maret 2026 sebanyak 61.564 tautan/link dengan rincian sebagai berikut:

1. Obat : 13.466 tautan/link
2. Obat Bahan Alam : 10.548 tautan/link
3. Obat Kuasi : 1.923 tautan/link
4. Suplemen Kesehatan : 2.450 tautan/link
5. Kosmetik : 19.300 tautan/link
6. Pangan Olahan : 13.877 tautan/link

Penjejakan Digital

HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI ANALISIS SIBER
Periode Januari s.d. Maret 2026

Pada periode Januari s.d Maret 2026, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah menghasilkan dokumen rekomendasi profiling siber dengan jumlah 21 (dua puluh satu) rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut:

- 19 Rekomendasi ditindaklanjuti dengan kegiatan intelijen lanjutan
- 1 Rekomendasi ditindaklanjuti penindakan
- 1 Rekomendasi ditindaklanjuti pemeriksaan setempat

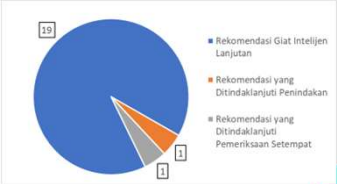

Analisis Digital Forensik
Periode Januari – Maret 2026

Pada periode Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap 3 (tiga) barang bukti elektronik dengan rincian sebagai berikut:

→ 3 Handphone

Bantuan forensik digital diberikan kepada Balai POM di Mamuju berkaitan dengan peredaran Obat-Obatan Tertentu dan Balai POM di Jember berkaitan dengan peredaran kosmetik illegal.

Kendala dan Upaya Perbaikan Direktorat Siber Obat dan Makanan

- Kendala
  - Diperlukannya penyesuaian pedoman operasi siber dan beberapa SOP untuk memperkuat kegiatan pengawasan dan penindakan kejahatan obat dan makanan illegal melalui media daring.
  - Adanya kebijakan Penajaman terhadap Belanja Negara Kementerian/Lembaga yang mengakibatkan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Tindak Lanjut
  - Melakukan persiapan untuk melakukan agenda pembahasan pedoman operasi siber dan SOP bersama dengan unit kerja teknis di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan.
  - Melaksanakan revisi anggaran yang diikuti dengan penyesuaian terhadap target output dan menyesuaikan kembali perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prioritas agar tetap mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TRIWULAN 1 TAHUN 2026

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran			Kendala / Hambatan
		Target	Realisasi s.d. 31 Maret	%	Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi s.d. 31 Maret (Ribu)	%	
1	Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	7	0	0	1.373.058	149.264	10.85%	Tidak ada kendala/hambatan
2	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	30	1	3,33	1.348.293	129.334	9.59%	Tidak ada kendala/hambatan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TW I TAHUN 2026
DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

No	Sasaran Program	Indikator	Volume				
			Realisasi	Target TW I	%	Target Tahunan	%
1	Hasil intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas Ditindaklanjuti	50	50	100	81	61.73
2	Terpetakannya Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Terpetakan	-	-	-	4	-
3	Terwujudnya tata kelola unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	-	-	-	84.8	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai standar	36	36	100	100	36
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	92	75	122.67	100	92
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	-	-	-	2.91	-

Hasil Kegiatan dan Operasi Intelijen per 31 Maret 2026

1. Kegiatan Intelijen

KET	KOMODITI				TOTAL
	ONAPPZA	OTSK-OK	KOS	PO-STRA	
Laporan Informasi	13	16	12	16	57

2. Laporan Intelijen

Laporan Informasi

Selama Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah menghasilkan 3 Laporan Intelijen dari hasil Operasi Intelijen yang dilakukan .

3. Rekomendasi Intelijen

Selama Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Intelijen Obatdan Makanan telah menghasilkan 2 Rekomendasi dari hasil Operasi Intelijen yang dilakukan .

Kendala dan Rencana Tindak Lanjut Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

Kendala

- Terjadi peningkatan durasi waktu pada fase transisi setelah rekomendasi dikirimkan hingga ditindaklanjuti ke penindakan (Eskalasi Lead Time Operasional)
- Adanya kebijakan pemotongan anggaran dan rigiditas administrasi keuangan yang berdampak pada keterbatasan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen

Rencana Tindak Lanjut

- Untuk mengurangi lead time operasional maka dilakukan dengan langkah Joint Review Stategis dan berkoordinasi denvan BPKOM agar segera merealisasikan rencana Mobile Lab dengan peralatan pengujian cepat/rapid guna memangkas waktu pengujian secara signifikan
- Optimalisasi Anggaran berbasis skala prioritas dengan menyusun pemetaan prioritas rekomendasi dan penyusunan protokol pelaporan khusus

BADAN POM

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TRIWULAN 1 TAHUN 2026

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran			Kendala / Hambatan
		Target	Realisasi s.d. 31 Maret	%	Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi s.d. 31 Maret (Ribu)	%	
1	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	0	0	2.436.968	337.136	13.83%	Masih dalam proses pelaksanaan penanganan berkas carry over
2	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifiaksi Operasi Penindakan	17	0	0	1.164.487	229.289	19.69%	Terdapat efisiensi sehingga masih dalam proses penentuan prioritas pelaksanaan penindakan terhadap kasus. Saat ini masih dalam tahap Pendalaman Informasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TW I TAHUN 2026
DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN

No	Sasaran Program	Indikator	Volume				
			Realisasi	Target TW I	%	Target Tahunan	%
1	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	15,71	13	120,85	85	18,48
		Persentase Pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	20	20	100	80	25
2	Terwujudnya tata kelola unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0	87,22	0
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	36	36	100	100	36
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	100	75	133,33	100	100
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0	2,88	0

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN S.D 31 MARET 2026

Pendalaman Informasi Kejahatan
DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

No	Komoditi	Lokasi	Dugaan Pelanggaran
1	Baby Whip	Jakarta Barat	TMS
2	OBA	Jakarta Selatan	TMS
3	Obat	Jakarta Timur	TMS
4	Kosmetik	Jakarta Selatan	TMS
5	Obat	Jakarta Pusat	TIE
6	Obat	Bogor	TKK
7	Obat	Jakarta Timur	OOT

Pendampingan UPT dalam rangka penyidikan

No.	UPT	Tanggal Pelaksanaan
1	Balai POM di Sofifi	31-Mar-2026
2	BBPOM di Medan	16 Maret 2026
3	BPOM di Surakarta	26 Februari 2026
4	Balai POM di Ambon	12 Februari 2026
5	BBPOM di Semarang	26 Februari 2026
6	Balai POM di Banyumas	11 Februari 2026
7	BBPOM di Lampung	11 Februari 2026
8	Balai POM di Bogor	13 Februari 2026
9	BBPOM di Padang	4 Februari 2026
10	BBPOM di Jakarta	21 Januari 2026

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN S.D 31 MARET 2026

Realisasi Perkara Nasional
DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Perkara Berdasar Komoditi

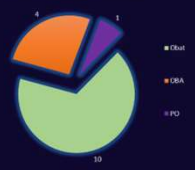

Total Nilai Keekonomian BB

539.976.575,00

Kendala dan Rencana Tindak Lanjut Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Kendala:

1. Masih adanya perbedaan persepsi terkait pelaksanaan penerapan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP diantara aparat penegak hukum baik ditingkat pusat maupun wilayah
2. Terdapat pemotongan anggaran sehingga kesulitan memetakan operasi yang akan diprioritaskan
3. Pendampingan Sebagian besar dilaksanakan secara online dikarenakan keterbatasan anggaran

Rencana Tindak Lanjut:

1. Koordinasi dengan Korwas dan Kejaksaan Agung RI ditingkat Pusat
2. Melaksanakan pendampingan berdasarkan pembobotan prioritas pada UPT

TERIMA KASIH

33